

Tinjauan Mata Kuliah

Setiap negara mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan, melindungi, dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tujuan negara pada umumnya dirumuskan dalam konstitusi negara. Di Indonesia, tujuan negara tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah sebagai pengelola negara merupakan pemegang mandat untuk mengelola aset-aset negara sehingga dapat menjadi sumber pendapatan negara. Pendapatan negara ini yang kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya. Penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan keuangan negara harus diatur. Pengaturan pengelolaan keuangan negara dituangkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Mata kuliah ini membahas berbagai aspek keuangan publik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran baik secara teoritis maupun kebijakan dalam konteks Indonesia. Pembahasan mencakup konsep keuangan negara, sumber-sumber penerimaan negara, pengeluaran negara, anggaran negara, pembiayaan pembangunan, pengawasan keuangan negara, kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara, hubungan keuangan antara pusat dengan daerah, serta pengawasan keuangan publik.

Pembahasan mengenai pengertian dan ruang lingkup keuangan negara akan dibahas pada Modul 1. Pada Modul 2 akan dibahas sumber-sumber penerimaan publik dan gambaran penerimaan publik di Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat diandalkan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, uraian tentang sumber penerimaan negara ini akan dibahas secara lebih detail dalam beberapa modul berikutnya yang mencakup uraian mengenai prinsip-prinsip perpajakan, administrasi perpajakan, dan analisis perpajakan. Semuanya akan dibahas secara berurutan pada Modul 3, Modul 5, dan Modul 6.

Sedangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara akan dibahas pada Modul 4. Pembahasan mengenai BUMN dan BUMD dipandang penting karena meskipun merupakan sumber penerimaan negara, namun dalam kenyataannya kontribusi BUMN dan BUMD terhadap penerimaan negara masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Oleh karena itu, perlu diupayakan peningkatan kinerja BUMN/BUMD agar menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang potensial.

Pengelolaan keuangan negara di samping membahas sumber-sumber penerimaan negara juga membahas pos-pos pengeluaran negara. Pengeluaran negara sesungguhnya mencerminkan aktivitas pemerintah. Karena semakin banyak aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara maka pengeluarannya akan semakin besar. Pada hampir setiap negara, pos pengeluaran negara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Termasuk di Indonesia, apalagi sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah, pos pengeluaran meningkat cukup tinggi. Topik mengenai pengeluaran negara akan dibahas pada Modul 7 dan Modul 8.

Penerimaan dan pengeluaran negara semuanya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Modul 9 akan membahas perencanaan dan penganggaran keuangan negara yang secara faktual tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang dan di dalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Anggaran negara mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Ketiga hal tersebut akan dibahas secara lebih rinci pada modul tersebut.

Dinamika penerimaan dan pengeluaran negara tidak terlepas dari kebijakan pemerintah di bidang keuangan yang mencakup kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Pada Modul 10 akan dibahas kebijakan pemerintah di bidang keuangan. Ada dua hal penting yang dibahas dalam modul ini, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang terkait dengan bidang keuangan yang dilakukan oleh bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Sedangkan kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah terkait dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan negara. Secara umum, kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi nasional sehingga pendapatan nasional secara nyata dapat meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya dan efektivitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan redistribusi pendapatan/kekayaan dan membuka kesempatan kerja.

Sejalan dengan diterapkannya kebijakan desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah maka setiap daerah harus mempunyai sumber-sumber pendapatan yang pasti dan memadai agar dapat menjalankan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus memberikan sumber-sumber pendapatan kepada pemerintah daerah, baik berupa pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pengelolaan sumber daya alam, dan sebagainya. Berbagai aspek yang terkait dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dibahas pada Modul 11.

Pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pengawasan keuangan negara merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang baik. Oleh karena itu, pada Modul 12 akan dibahas mengenai pengawasan keuangan publik yang sangat krusial untuk menjamin bahwa keuangan negara dikelola dengan sebaik-baiknya. Pengawasan keuangan negara Indonesia menganut sistem pengawasan berlapis, artinya tidak hanya satu lembaga

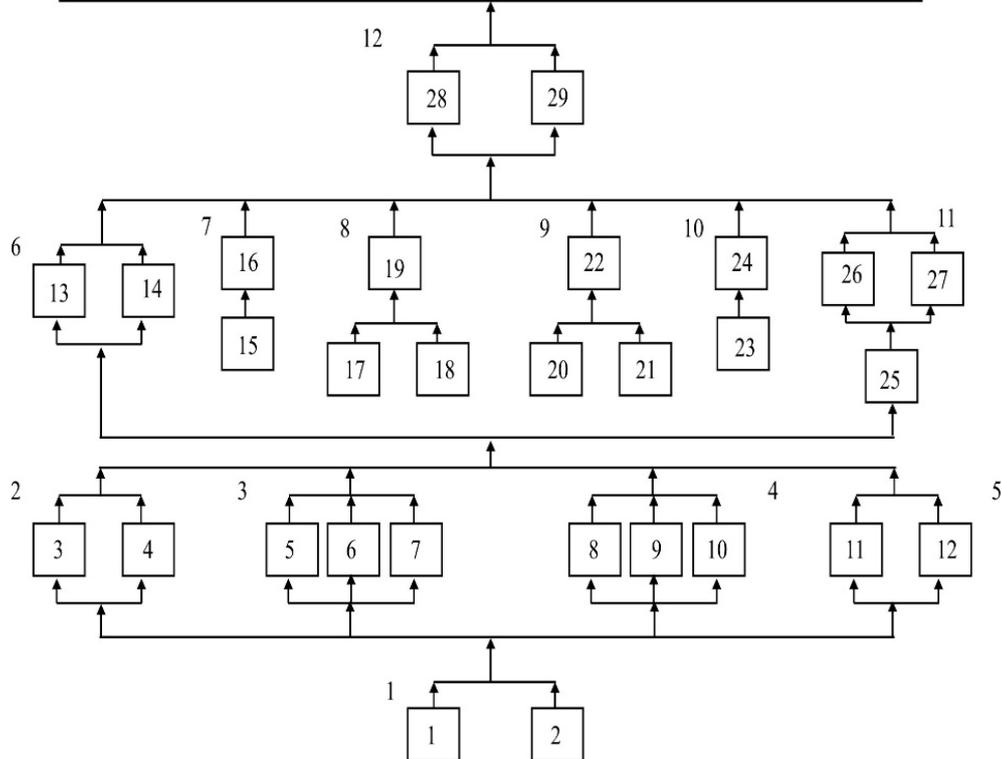
saja yang melakukan pengawasan keuangan kepada pemerintah pusat maupun daerah, terhadap penggunaan dana publik yang terdapat dalam APBN maupun APBD. Terdapat beberapa lembaga pengawasan yang melakukan pengawasan tersebut, baik internal maupun eksternal pemerintah. Jenis-jenis pengawasan maupun lembaga yang melakukan pengawasan akan dibahas secara rinci di dalam modul tersebut. Dengan membahas keseluruhan dari 12 modul tersebut maka diharapkan Anda akan mampu menganalisis berbagai aspek keuangan publik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, baik secara teoretis maupun kebijakan dalam konteks Indonesia.

TUJUAN KOMPETENSI UMUM MATA KULIAH (TKU)

Modul ini dilengkapi dengan Tujuan Kompetensi Umum di mana peserta setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mampu mengevaluasi berbagai aspek keuangan publik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran baik secara teoretis maupun kebijakan dalam konteks Indonesia. Untuk mencapai TKU di atas, maka Tujuan Kompetensi Khusus (TKK) yang harus Anda kuasai.

Peta Kompetensi Administrasi Keuangan Publik/MAPU5202/4 SKS

TKU: Peserta mampu mengevaluasi berbagai aspek keuangan publik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran baik secara teoritis maupun kebijakan dalam konteks Indonesia.



Kompetensi Umum Mata Kuliah.

Kompetensi Umum setelah mempelajari matakuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai aspek keuangan publik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran baik secara teoretis maupun kebijakan dalam konteks Indonesia.

Kompetensi Khusus Mata Kuliah.

Kompetensi Khusus setelah mempelajari matakuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu:

1. menjelaskan Tugas-tugas Negara/Peran Pemerintah;
2. menjelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Publik;
3. menjelaskan Pengertian dan Sumber-sumber Penerimaan Publik;
4. menjelaskan Gambaran Penerimaan Publik di Indonesia;
5. menjelaskan Pengertian, Prinsip, dan Sistem Perpajakan;
6. menjelaskan Jenis-jenis Pajak;
7. menjelaskan Penggolongan Pajak;

8. menjelaskan Fungsi, Tujuan, dan Jenis-jenis BUMN/BUMD;
9. menjelaskan Kinerja BUMN/ BUMD;
10. menjelaskan Restrukturisasi dan Privatisasi Perusahaan Negara/Daerah;
11. menjelaskan Pengertian dan Tahapan Administrasi Pajak;
12. menjelaskan Ukuran-ukuran Kinerja Administrasi Pajak;
13. menganalisis Prinsip-prinsip Perpajakan;
14. menganalisis Pengaruh Pajak terhadap Perekonomian;
15. menjelaskan Pengertian Pengeluaran Publik;
16. menganalisis Jenis-jenis Pengeluaran Publik dan Beberapa Pengeluaran Publik Terpenting;
17. menguraikan Pengertian dan Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan;
18. menguraikan tentang Pinjaman dan Obligasi;
19. menganalisis tentang Investasi;
20. menguraikan pengertian dan Manfaat Anggaran Negara;
21. menguraikan Jenis-jenis Anggaran Negara;
22. menganalisis Bentuk Anggaran Negara dan Proses Penyusunan Anggaran Negara;
23. menguraikan Kebijakan Keuangan Negara;
24. menganalisis Kebijakan Moneter dan Perpajakan;
25. menguraikan Pembagian Kekuasaan Pemerintah;
26. menganalisis Asas dan Pembagian Kewenangan Pemerintahan;
27. menganalisis Alokasi Dana dari Pemerintah Pusat ke Daerah;
28. mengevaluasi Pengawasan Keuangan Publik dan Jenis-jenis Pengawasan keuangan Publik;
29. mengevaluasi Peranan Lembaga Pengawas Keuangan Publik.

Tips Mempelajari Bahan Ajar (Modul) Ini.

Agar Anda mencapai TKU yang diharapkan dari bahan ajar ini maka pertama-tama Anda membaca seluruh isi modul ini. Anda tidak harus membaca modul ini secara berurutan dari modul satu sampai modul dua belas, tetapi Anda bisa memilih materi yang ingin Anda kuasai terlebih dahulu, misalnya materi tentang perpajakan maka Anda bisa membacanya pada Modul 3, 5, dan 6 demikian pula materi yang lain.

Pada akhir setiap modul, terdapat beberapa pertanyaan sebagai latihan, maupun sebagai semacam tes bagi Anda sendiri, untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap isi modul yang bersangkutan. Karena itu, disarankan agar Anda mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di akhir modul ini dan mengecek jawabannya, sebelum meneruskan ke modul berikutnya.

Selamat Belajar, sukses menyertai Anda!

